



“Provinsi Bali siap untuk menyusun RAD-PG dengan mengacu pada RAN-PG 2021-2024 yang baru disusun, dengan berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Bappenas. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat memacu daerah, termasuk Provinsi Bali, dalam menyusun RAD-PG. Belajar dari kondisi pandemi, Provinsi Bali mulai menyusun transformasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata saja tetapi juga sektor pertanian serta industri kecil dan menengah. Hal tersebut akan berdampak pada program terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian. Sementara itu, diharapkan dokumen RAD-PG juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penurunan stunting di Provinsi Bali.”

I Wayan Wiasthana Ika Putra
Kepala Bappeda
Provinsi Bali

SATU DEKADE MELANGKAH BERSAMA

Jarot Indarto

**Koordinator Fungsional Perencana Madya
Direktorat Pangan dan Pertanian**

ScalingUp
**NUTRITION
INDONESIA**
2021 ANNUAL MEETING



“RAN-PG 2021-2024 berisi penajaman kegiatan dalam mempercepat pencapaian target SDGs. Selain itu, penguatan isu pangan dan pertanian serta penambahan isu strategis seperti kesetaraan gender dan respon kegawatdarutan menjadi konsep baru yang ada pada RAN-PG 2021-2024. Oleh karena itu, RAN-PG dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RAD-PG bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan mengintegrasikan isu pangan dan gizi.”

Jarot Indarto

**Koordinator Fungsional Perencana Madya
Direktorat Pangan dan Pertanian
Kementerian PPN/Bappenas**

SATU DEKADE MELANGKAH BERSAMA



*“RAN-PG sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, mengatur tentang ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan **penguatan kelembagaan pangan dan gizi secara multisektor**. Oleh karena itu, penyusunan **RAD-PG** perlu disinkronkan dengan **RAN-PG** serta didukung dengan **penganggaran melalui APBD** dan **sejalan dengan RKPD** di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta **diperkuat melalui peraturan daerah.**”*

Edison Siagian
Direktur SUPD I
Kementerian Dalam Negeri

SATU DEKADE MELANGKAH BERSAMA



“Stunting menjadi salah satu indikator utama pada RPJMD Sumatera Selatan. RAD-PG 2019-2023 Provinsi Sumatera Selatan juga telah diresmikan dalam Peraturan Gubernur dan akan segera disesuaikan dengan RAN-PG 2021-2024 yang telah disusun oleh Bappenas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah memberikan pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan RAD-PG yang diintegrasikan dengan 8 Aksi Konvergensi Stunting.”

Joni Awaludin
Kepala Bidang Pemerintahan, Kesos, dan Kesra
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

SATU DEKADE MELANGKAH BERSAMA



“RAN-PG bersifat *multisektoral* yang disusun oleh Bappenas bersama dengan 31 Kementerian/Lembaga sebagai *operasionalisasi* dari *RPJMN* dan *SDGs*. Oleh karena itu, diharapkan RAN-PG 2021-2024 dapat dijadikan *acuan* bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun *RAD-PG* yang *diintegrasikan* dengan *aksi konvergensi* penurunan *stunting*, yang juga dapat *melibatkan Non-Pemerintah*.”

Pungkas Bahjuri Ali
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kementerian PPN/Bappenas

SATU DEKADE MELANGKAH BERSAMA